

EKOLOGI PEMERINTAHAN

TATA KELOLA DAN
KELEMBAMAN BIROKRASI
DALAM MENANGANI
KEBAKARAN HUTAN,
PENGELOLAAN SAWIT
SERTA PERANAN ELIT LOKAL

Eko Priyo Purnomo

dengan Achmad Nurmandi, Tunjung Sulaksono
Mega Hidayati, Rijal Ramdani, Agustiyara

Pengantar oleh

Dr. Tachrir Fathoni, Dirjen KSDAE KLHK



EDISI PERTAMA

EKOLOGI PEMERINTAHAN
TATA KELOLA DAN KELEMBAMAN BIROKRASI DALAM
MENANGANI KEBAKARAN HUTAN, PENGELOLAAN
SAWIT, SERTA PERANAN ELIT LOKAL

**Eko Priyo Purnomo
Achmad Nurmandi
Tunjung Sulaksono
Mega Hidayati
Rijal Ramdani
Agustiyyara**

**EKOLOGI PEMERINTAHAN
TATA KELOLA DAN KELEMBAMAN BIROKRASI DALAM
MENANGANI KEBAKARAN HUTAN, PENGELOLAAN
SAWIT, SERTA PERANAN ELIT LOKAL**

Didukung oleh:



**EKOLOGI PEMERINTAHAN
TATA KELOLA DAN KELEMBAMAN BIROKRASI DALAM
MENANGANI KEBAKARAN HUTAN, PENGELOLAAN
SAWIT, SERTA PERANAN ELIT LOKAL**

Penulis:

Eko Priyo Purnomo

Achmad Nurmandi

Tunjung Sulaksono

Mega Hidayati

Rijal Ramdani

Agustiyara

Sirkulasi : Budi Estri & Lubna Salsabila

Layout : Rijal Ramdani

Design : Agustiyara

Penerbit : LP3M UMY

ISBN 978-602-7577-82-4

Cetakan Pertama, November 2016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR WB,

Bismilahirrahmanirrahim,

Atas nama Allah yang Maha Pemurah serta Maha Penyayang, segala puji kepada Allah SWT sang Penguasa Alam. Solawat serta salam kami tujukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku Ekologi Pemerintahan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pola penguasaan lahan oleh *Small and Medium-sized Agriculturists* (SMAs) dalam hal ini adalah elit lokal dan masyarakat di Indonesia. Dipetakan bagaimana pola pembukaan lahan dan pemeliharaan perkebunan sawit oleh SMAs. Ditelaah juga pola koordinasi dan komunikasi penanganan kebakaran oleh daerah dan para pemangku kepentingan lain. Buku ini juga melihat apakah ada kelembaman birokrasi sehingga pencegahan dan pemadaman belum optimal. Buku ini sangat direkomendasikan dibaca para pengusaha, penulis serta mahasiswa yang ingin mengetahui tentang tata kelola lahan khususnya dalam pengelolaan sawit dengan fokus bagaimana mengatasi kelembaman birokrasi (*bureaucraticinertia*) agar mitigasi kebakaran hutan serta lahan dapat diselesaikan secara optimal.

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tahun 2013 menurut penilaian Bank Dunia mencapai Rp.

20 triliun (CNNIndonesia, 2015). Kerugian tahun ini dapat jauh melebihi angka tersebut, jika memperhitungkan kebakaran di berbagai daerah lain. Kebakaran tahun 2015 disebut memproduksi CO₂ sebesar 16 Juta Metrik ton perhari atau lebih banyak dari produksi US selama sehari dengan 0,5 Juta kena penyakit ISPA dan 43 Juta orang kena dampak asap (World Resouces Institute, 2015).

Pada sisi yang lain, perusahaan perkebunan sawit sering dituding menjadi penyebab utama karhutla. Riset tim penulis CIFOR (Gaveau et.al, 2014) terhadap karhutla di Riau tahun 2013 yang menimpa 3 juta ha lahan di Riau, menunjukkan bahwa: 1) 52% dari kebakaran (84.717 ha) adalah dalam konsesi sawit dan akasia (Hutan Tanaman Industri/HTI), tetapi 2) 60% dari kebakaran di konsesi tersebut, berasal dari area yang ditempati masyarakat/pekebun kecil dalam konsesi tersebut (*enclave*).

Buku ini mencoba menggali bagaimana tata kelola lahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta daerah telah dilakukan. Fokus dari buku ini mencoba menggambarkan masyarakat yang disebut pekebun kecil-menengah-besar (*small-medium-scale agriculturalists/SMA*s) dan dalam studi CIFOR (2014), sebenarnya adalah suatu jaringan lokal yang rumit dan memanfaatkan masyarakat, aparat desa, kelompok tani, koperasi, untuk membakar lahan dan kemudian menjual lahan siap tanam maupun sudah ditanam kepada elit lokal yang ada di daerah tersebut maupun di luar daerah (Purnomo, 2015). Peraturan Menteri Pertanian tidak mensyaratkan adanya izin, tetapi justru meminta pemerintah daerah untuk mendaftar pekebun kecil.

Buku ini juga memaparkan secara jernih dan cermat beberapa temuan yang melihat tata kelola lahan serta hubungannya dengan kelembaman birokrasi (*Bureaucratic inertia*) serta peran elit lokal dalam pemanfaatan lahan di Indonesia, khususnya

Riau. Birokrasi adalah lembaga yang didorong bekerja secara rasional, profesional serta merupakan organisasi besar yang mampu menyediakan kebutuhan publik secara tepat. Akan tetapi keadaan di Indonesia menunjukkan hal yang berbeda. Keadaan yang disebut dengan Bureaucratic Inertia atau kelembaman birokrasi. Keadaan ini melihat birokrasi sebagai organisasi yang belum efisien, tidak fleksibel atau malah terlalu *rigid*, kolaborasi antar pihak kurang dan tujuan atau sasaran lembaga menjadi tidak tepat serta kurang legitimitasi.

Paparan menarik berikutnya dari buku ini adalah tentang peran elit lokal dalam membagi kuasa atau sumber daya di daerah. Elite merujuk pada orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan, kemampuan ekonomi, penguasaan teknologi atau pengetahuan serta kemampuan sosial di dalam masyarakat atau negara. Jadi Elit lokal adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki pengaruh serta kuasa di level daerah atau wilayah tertentu. Pada buku ini dipaparkan bagaimana jaringan lokal ini memanfaatkan kemudahan yang diberikan untuk pekebun sawit kecil (kurang dari 25 ha), dan aturan yang membolehkan membakar lahan untuk masyarakat lokal. Pada sisi ini juga dilihat SMAs dikuasai oleh elit lokal (di antaranya pejabat pemerintah lokal). Praktek yang tidak bertanggung jawab dari SMA ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kelembaman birokrasi (dari kelalaian/*omission* atau kesengajaan atau perintah/*commission* dari aparat pemerintah daerah dan aparat pusat di daerah) dalam pencegahan karhutla, mulai dari penyiapan anggaran yang memadai untuk pencegahan, sampai ke kegiatan pemadaman, *disaster relief*, sampai rehabilitasi lahan pasca karhutla.

Para penulis menggunakan data primer dan sekunder terkait karhutla di Riau. Data primer akan diperoleh dari: *survey*, *policy review*, analisis APBD, FGD, *cost benefit analysis*, *network analysis*. Data sekunder akan diolah dari penulisan sebelumnya

terkait karhutla di Riau dan Indonesia, studi terkait elit politik lokal pasca otonomi daerah, penguasaan sumber daya lokal dan sumber lain yang relevan.

Semoga buku ini selain menjadi salah satu bacaan para pemikir, penulis serta pengusaha perkebunan di Indonesia, diharapkan buku ini mampu memberi kontribusi positif bagi pemanfaat lahan serta pembangunan perkebunan sawit yang lebih lestari.

Wassalamualaikum WR WB.

Jakarta, 29 September 2016

Dr Tachrir Fathoni

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem KLHK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM	xv
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Gambaran Umum Buku	1
BAB II KELEMBAGAAN, BIROKRASI, MANAGEMENT HUTAN SERTA ELIT	5
I. Manajemen Kehutanan di Negara Berkembang.....	5
II. Pendekatan Kelembagaan pada Pengelolaan Sumber Daya.....	11
II.1 Pemahaman Kelembagaan	11
II.2 Lembaga dan Badan Pengelolaan Sumber Daya ...	14
II.3 Birokrasi Hutan di Saat Kebakaran	32
II.4 Keadaan Bahaya dan Bencana	35
II.4.1 Proses	35
II.4.2 Struktur dan Tata Kelola.....	36
II.4.3 Tantangan dan Hambatan	37

III. Kelembaman Birokrasi	38
III.1 Anggaran	41
III.2 Ketidakpastian: Keadaan Berbahaya.....	42
III.3 Jalan Ketergantungan: Struktur dan Tata Kelola Pemerintah	44
III.4 Kekuatan dan Kekuasaan.....	44
IV. Elit Lokal	46

BAB III EKSPANSI SAWIT: Penurunan Tutupan dan

Kebakaran Hutan Riau	49
I. Ekspansi Perkebunan Sawit	49
II. Penurunan Luas Tutupan Hutan	55
III. Peningkatan Luas Lahan Sawit di Provinsi Riau	57
III.1 Luas Perkebunan Sawit Per Kabupaten	59
III.2 Persebaran Jumlah Perusahaan	60
IV. Persebaran Titik Api	61

BAB IV FAKTOR KEBAKARAN HUTAN DAN

PENGUASAAN ELIT LOKAL.....	67
I. Pengantar	67
II. Pemetaan Karhutla	67
II.1 Sebaran Kebakaran	67
II.2 Sebaran Kabupaten dan Kecamatan.....	69
II.3 Jenis Lahan Terbakar.....	71
III. Kasus–kasus Kebakaran dan Kepemilikan Lahan	73
III.1 Kecamatan Siak Kecil.....	74
III.1.1 Desa Tanjung Belit.....	74
III.1.2 Sumber Jaya.....	76
III.1.3 Desa Sungai Linau	79
III.1.4 Peta Kepemilikan Lahan Kec. Siak Kecil	80
III.2 Kasus Kebakaran Kec. Bukit Batu.....	82
III.2.1 Desa Dompas	84
III.2.2 Desa Sungai Pakning	87

III.2.3 Desa Sepahat	88
III.2.4 Desa Tanjung Leban	93
III.3 Kasus Kebakaran Kecamatan Bantan	98
III.3.1 Desa Teluk Lancar	99
III.3.2 Desa Kembang Baru.....	102
III.3.3 Desa Bantan Tua	104
III.3.4 Kasus Kebakaran Kecamatan Bengkalis	108
III.4 Analisis Penyebab Karhutla	110
III.4.1 Sengaja Dibakar	110
III.4.2 Lahan Tidur & Semak Belukar	116
III.4.3 Faktor Tidak Sengaja	118
III.4.4 Kekeringan, Cuaca dan Kanalisasi	120
III.4.5 Etnis dan Migrasi Etnis	128
III.4.6 Konflik Lahan dan Penguasaan Air	131
III.5 Analisis Penguasaan Lahan.....	133
III.5.1 Penguasaan HTI dan PBS Sawit	133
III.5.2 Penguasaan Elit Lokal	135

BAB V KERJASAMA DALAM PENANGGULANGAN

KARHUTLA	141
I. Stakeholder Penanggulangan Karhutla	141
I.1 PUSDALKARHUTLA	142
I.2 NGOs & Ormas.....	150
II. Analisis Kerjama	153
II.1 Lemahnya Kerjasama	153
II.1.1 Analisis Smart PLS	153
II.1.2 <i>Social Network Analysis</i>	158
II.2 Sentralitas dalam kolaborasi.....	163
II.3 Kolaborasi Tingkat Kabupaten	166

BAB VI KELEMBAMAN BIROKRASI	171
I. Pengantar	171
II. Faktor Kelembaman	177
II.1. Kewenangan dan Legitimasi	177
II.2. Besarnya Struktur	180
II.3. Muatan Peraturan Perundangan.....	181
II.4. Komitmen Pemerintah	183
II.5. Aspek Anggaran	188
II.5. Korupsi dibalik Karhutla	192
DAFTAR PUSTAKA	197
DAFTAR INDEKS	205
BIOGRAFI PENULIS	207

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rerata Perubahan Bersih Tahunan Hutan	6
Tabel 2.2	Demografi, Politik dan Karakteristik Ekonomi .	24
Tabel 2.3	Faktor yang menyebabkan kelembaman birokrasi	40
Tabel 3.7	Dampak Perkebunan Kelapa Sawit	54
Tabel 4.1	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Siak Kecil tahun 2016	74
Tabel 4.2	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bukit Batu tahun 2013	83
Tabel 4.3	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bukit Batu tahun 2014	83
Tabel 4.4	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bukit Batu tahun 2015	84
Tabel 4.5	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bukit Batu tahun 2016	84
Tabel 4.6	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bantan tahun 2015	99
Tabel 4.7	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bantan tahun 2016	99
Tabel 4.8	Persebaran Kebakaran di Kecamatan Bukit Batu tahun 2016	113
Tabel 4.9	Gambaran penguasaan lahan oleh petani kelapa sawit	138

Tabel 4.10	Gambaran penguasaan lahan oleh elit lokal di kabupaten Bengkulu.....	140
Tabel 5.1	Institusi PUSDARKARHUTLA di Tingkat Provinsi	144
Tabel 5.2	Struktur Organisasi Sub-PUSDALKARHUTLA Kabupaten.....	145
Tabel 5.2	Institusi Sub-Satgas PUSDARKARHUTLA di Tingkat Kabupaten	147
Tabel 5.3	Susunan Organisasi Sub-Satgas Sektor di Tingkat Kecamatan.....	148
Tabel 5.3	Institusi Sub-Satgas PUSDARKARHUTLA di Tingkat Kecamatan	149
Tabel 5.4	NGOs yang Concern dalam Isu Lingkungan (Karhutla)	150
Tabel 5.5	Ormas dan Masyarakat Kampus yang Concern dalam (Karhutla).....	151
Table 5.6	Profile Data Responden INSTITUSI.....	154
Table 5.7	Data Bidang Responden Jabatan	155
Tabel 5.9	Data metrik setruktur jaringan, 2016.....	161
Table 5.10	Data metrik sentralitas dalam kolaborasi, 2016	163
Tabel 5.11	Data metrik sentralitas dalam kolaborasi, 2016	163
Tabel 5.12	Data metrik aktor dalam konteks <i>degree centrality, betweenness centrality</i> dan <i>closeness centrality</i> , 2016.....	165
Table 5.13	Network Data Statistik di Tingkat Kabupaten	168
Table 5.14	Perbandingan Jaringan Stakeholders di Secara keseluruhan dan tingkat Kabupaten, 2016 ...	168
Tabel 6.1	response regulations on Forest Fires	177
Tabel 6.2	Anggaran Dinas Kehutanan (2009-2013)	189
Table 6.3	Anggaran Penanggulangan Kebakaran Hutan Dinas Kehutanan.....	189

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

Gambar 2.1	Kerangka untuk Analisis Kelembagaan.....	21
Gambar 2.2	Model Ekonomi Kelembagaan Baru.....	27
Gambar 2.3	Paradoks Kontrol Negara: Peraturan dan Ekonomi Informal	28
Gambar 2.3	Kualitas Pemerintah	30
Gambar 2.4	Kolaborasi Lintas Sektor	34
Diagram 3.1	Sawit Pangsa Terbesar Ekspor Riau.....	50
Diagram 3.2	Perkembangan Luas Lahan Sawit	50
Diagram 3.3	Produksi Kelapa Sawit di Provinsi Riau	51
Diagram 3.4	Perkembangan Produksi Sawit Riau.....	52
Diagram 3.5	Produksi Crude Palm Oil di Provinsi Riau	52
Diagram 3.6	Share Ekspor Minyak Sawit di Riau	53
Diagram 3.8	Luas Hutan Berdasarkan Fungsi di Prov Riau	55
Diagram 3.9.	Presentase Hutan Berdasarkan Fungsi	56
Diagram 3.10	Penurunan Jumlah Tutupan Hutan di Provinsi Riau	56
Diagram 3.11	Pertumbuhan Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau (Ha)	57
Digram 3.12	Luas Hutan Berdasarkan Status Kepemilikan (Ha)	58

Diagram 3.13 Sebaran Luas Perkebunan Sawit (Ha) Per Kabupaten tahun 2014	59
Diagram 3.14 Perkembangan Luas Lahan Sawit per-Kabupaten di Provinsi Riau	60
Diagram 3.15 Persebaran perusahaan sawit di provinsi Riau	61
Diagram 3.16 Tiga Kabupaten dengan Titik Api Tertinggi dan Terendah	62
Diagram. 3.17 Titik Panas di Provinsi Riau Berdasarkan Provinsi dan Kabupaten	63
Diagram 3.18 Perbandingan Lahan, Titik Api dan Perusahaan	64
Diagram 4.1 Perbandingan Luas Lahan Terbakar di 5 Provinsi di Indonesia 2014	68
Diagram 4.2 Perkembangan Titik Api 11 Tahun Terakhir di Provinsi Riau	68
Diagram 4.3 Kabupaten Tettinggi Hot Spot dalam 5 Tahun Terakhir	69
Diagram 4.4 Jumlah Sebaran Kecamatan Rawan Api di Provinsi Riau Per Kabupaten	70
Diagram 4.5 Jumlah Titik Api di 5 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis 2013 – 2015	70
Diagram 4.6 Presentase Luas Lahan Gambut di 5 Kecamatan Kab. Bengkalis	71
Diagram 4.7 Presentase Luas Lahan Gambut per Kabupaten di Provinsi Riau	72
Gambar 4.1 Pemetaan Kecamatan Rawan Terjadi Kebakaran	72
Gambar 4.2 Sebaran Ekosistem Kubah Gambut di Kabupaten Bengkalis	73
Gambar 4.3 Area Lahan Milik Masyarakat yang Terbakar, Akses Jalan dan Perkebunan Sawit	75

Gambar 4.4	Sarang walet di area perkebunan Sawit milik pengusaha lokal tiongkong, 3 km dari lokasi kebakaran 150 Ha 2016.....	78
Gambar 4.5	Lahan Terbakar Milik Pemda Kab.Bengkalis di Sungai Linau Kec. Siak Kecil	80
Gambar 4.6	Kebun Karet yang Sengaja Dibakar Dikonversi Menjadi Perkebunan Sawit	85
Gambar 4.7	Lahan Tidur Milik Pertamina yang Siap Dirambah oleh Masyarakat Sungai Pakning	88
Gambar 4.8	Semak Belukar Terbakar Beberapa kali 2014 & 2015 di Sepahat Jl. Lintas Dumai	89
Gambar 4.9	Kebiasaan Masyarakat Memerun di Tengah Perkebunan Sawit Saat Terik Matahari	91
Gambar 4.10	Salah Satu Rumah Warga yang Memiliki Lahan Lebih dari 10 Ha di Desa Sepahat ...	92
Gambar 4.11	Kanal Dibuat oleh HTI di Tengah Perkebunan Milik Masyarakat	94
Gambar 4.12	Lahan terbakar di tahun 2014 & 2015 yang sudah tertanami kelapa sawit	95
Gambar 4.13	Lahan karet milik masyarakat & hutan yang terbakar di Desa Teluk Lancar	101
Gambar 4.14	Area konsesi HTI PT. RRL lebih dari 150 ha terbakar di tahun 2016	103
Gambar 4.15	Lahan terbakar milik PNS Bengkalis dan milik anggota DPRD Bengkalis di Bantan Tua ..	105
Gambar 4.16	Jalan beton menuju lahan yang dimiliki PNS dan anggota DPRD Bengkalis	106
Gambar 4.17	Pemberitaan Resmi Oknum PNS Kantor Bupati Bengkalis Bakar Hutan	107
Gambar 4.18	Kebaran di desa Senggoro Kec. Bengkalis di lahan tidur milik masyarakat	109

Gambar 4.19	Bukti pembakaran terhadap lahan sebelum ditanami Sawit, di kecamatan Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil.	112
Gambar 4.20	Memerun yang dilakukan masyarakat di Bengkalis	115
Gambar 4.21	Kebun karet yang sengaja dibakar untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit	116
Diagram 4.8	Trend Peningkatan Hotspot di Provinsi Riau	120
Diagram 4.9	Perbandingan karhutan di bulan Februari - Maret tahun 2015 dan 2016	121
Diagram 4.10	Perbandingan tingginya hotspot per bulan tahun 2014 dan 2015	122
Diagram 4.11	Banyaknya lahan terbakar berdasarkan Bulan di kecamatan Bukit Batu Bengkalis	122
Gambar 4.22	Kanalisisasi Lahan Gambut	123
Diagram 4.12	Panjang kanal per kabupaten di Provinsi Riau 2016	124
Gambar 4.23	Kanal besar perusahaan HTI dan perahu penarik tongkang akasia	125
Gambar 4.24	Kanal perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Meskom Agro Sarimas)	126
Gambar 4.25	Alat berat milik investor digunakan membangun kanal	127
Diagram 4.13	Presentase etnis di Bengkalis	128
Gambar 4.26	Rumah-rumah penunggu perkebunan kelapa sawit	129
Diagram 4.14	Luas lahan konsesi perusahaan-perusahaan HTI (ha)	134
Gambar 4.27	Peta penguasaan lahan HTI di kabupaten Bengkalis.....	134

Diagram 4.15	Penguasaan lahan oleh PBS kelapa sawit (000 ha)	135
Diagram 4.16	Perkembangan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat (PR)	136
Diagram 4.17	Perkembangan jumlah petani perkebunan sawit di kabupaten Bengkali (000 orang) ..	137
Gambar 5.1	Struktur Organisasi PUSDALKARHUTLA Provinsi	143
Gambar 5.2	Pola Hubungan Antar Variable	155
Diagram 5.1	Grafik Path Coefficient Antar Variabel	157
Gambar 5.5	Struktur Jaringan dari stakeholders yang terlibat dalam penanganan Karhutla di Provinsi Riau, 2016	159
Gambar 5.6	Link grafik dari Stakeholders di Tingkat Kabupaten berdasarkan aktor penanganan kabakaran di lapangan, 2016	167
Gambar 6.1	<i>Mind Map</i> Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran di Kabupaten Bengkalis	171
Gambar 6.2	Struktur Organisasi SATGAS	180

DAFTAR SINGKATAN

AA	=	Arara abadi
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBH	=	Bukit Batu Hutan Alam
BDB	=	Bina Daya Bintara
BKM	=	Balai Kayang Mandiri
BPBD	=	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	=	Badan Pusat Statistik
BTS	=	Buah Tandan Segar
CIFOR	=	Center for International Forestry Research
CPO	=	Crude Palm Oil
DAMKAR	=	Pemadam Kebakaran
DISBUNHUT	=	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
FAO	=	Food and Agriculture Organization
FGD	=	Focus Group Discussion
FITRA	=	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
GAPKI	=	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HGU	=	Hak Guna Usaha
HTI	=	Hutan Tanaman Industri
HTI	=	Hutan Tanaman Industri
IUP-B	=	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya
IUPHHK	=	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
JIKALAHARI	=	Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
Karhutla	=	kebakaran hutan dan lahan

KLHK	=	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PANSUS	=	Panitia Khusus
PBN	=	Perkebunan Besar Negara
PBS	=	Perkebunan Besar Swasta
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
PKS	=	Perusahaan Kelapa Sawit
PR	=	Perkebunan Rakyat
PUSDALKARHUTLA	=	Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
RAL	=	Riau Abadi Lestari
RRL	=	Rimba Rokan Lestari
RRL	=	Rokan Rimba Lestari
RRP	=	Rimba Rokan Perkasa
RTRW	=	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SATKOLAP	=	Satuan Pelaksana Operasional
SKA	=	Sekato Pratama Makmur
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMAs	=	Small and Medium- sized Agriculturists
SNA	=	Social Netwrok Analysis
SPA	=	Satria Perkasa Agung
SRL	=	Sumatera Riang Lestari
SSS	=	Sinar Sawit Sejahtera
STDB	=	Surat Tanda Daftar Perkebunan untuk Budidaya
USA	=	United State of America